

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
MENGELOLA ASPIRASI MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF  
*FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*  
(Studi Kasus di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten  
Gresik)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**Sarah Ristya Putri**

**NIM. 05040421108**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara  
Surabaya  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarah Ristya Putri  
NIM : 05040421108  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Dalam Mengelola Aspirasi Masyarakat Desa  
Perspektif Fiqh Siyāsah Dusturiyah (Studi Kasus  
di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah,  
Kabupaten Gresik)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



**Sarah Ristya Putri**  
NIM. 05040421108

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sarah Ristya Putri  
NIM. : 05040421108  
Judul : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam  
Mengelola Aspirasi Masyarakat Desa Perspektif Fiqh  
Siyāṣah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Banyuurip,  
Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 03 Januari 2025

Pembimbing,



**Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H**  
NIP. 19683292000032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sarah Ristya Putri

NIM : 05040421108

Telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



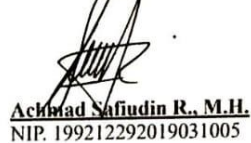
**Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, M.H.**  
NIP. 196803292000032001

Penguji II



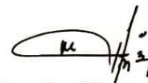
**Dr. Lutfil Ansori, S.H.I., M.H.**  
NIP. 198311132015031001

Penguji III



**Achmad Sufiudin R., M.H.**  
NIP. 199212292019031005

Penguji IV



**Mega Ayu Ningsvas, M.H.**  
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 17 Februari 2025  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



**Brkhiyatiyah Musafa'ah, M. Ag.**  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sarah Ristya Putri  
NIM : 05040421108  
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
E-mail address : [sarahristya@gmail.com](mailto:sarahristya@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (..... )  
yang berjudul :

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGELOLA  
ASPIRASI MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH***

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Desember 2024

Penulis

(Sarah Ristya Putri)

## ABSTRAK

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengelola aspirasi masyarakat desa, khususnya di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Namun, dalam prakteknya, proses tersebut seringkali menemui berbagai tantangan. Penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengelola aspirasi tersebut dengan perspektif *Fiqh Siyasah Dustūriyah*, yaitu kajian tentang politik dan pemerintahan dalam Islam, untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip *fiqh* dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan desa yang adil dan berpihak pada kepentingan umat. Hal ini penting untuk memperkuat sinergi antara peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan nilai-nilai agama dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian empiris dan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengelola aspirasi masyarakat Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, dengan perspektif *Fiqh Siyasah Dustūriyah*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, serta masyarakat setempat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, dan pemerintah desa dalam pengelolaan aspirasi. Penelitian ini juga menghubungkan temuan empiris dengan teori *Fiqh Siyasah Dustūriyah* untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem pemerintahan desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, berfungsi sebagai jembatan yang efektif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Proses musyawarah yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum mencerminkan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah Dustūriyah*, seperti musyawarah (*shura*), keadilan, dan maslahat publik, dalam pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan bersama. Meskipun demikian, tantangan dalam pengelolaan aspirasi masyarakat masih muncul, seperti ketidakteraturan partisipasi masyarakat dan kurangnya pemahaman yang merata tentang mekanisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Saran dari penulis untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa. Peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan dan pendidikan dapat membantu meningkatkan kinerja mereka dalam menyerap dan mengelola aspirasi masyarakat. Penting untuk memperkuat transparansi dalam setiap keputusan yang diambil agar masyarakat merasa lebih terlibat dan percaya pada proses pemerintahan desa. Dengan langkah-langkah tersebut,

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SAMPUL DALAM.....</b>                                                                                            | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                                                                 | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                                                                                              | <b>v</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>                                                                                   | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                          | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                              | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>                                                                                   | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                       | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                                                                             | 1           |
| B. Identifikasi Masalah.....                                                                                        | 15          |
| C. Batasan Masalah.....                                                                                             | 16          |
| D. Rumusan Masalah .....                                                                                            | 17          |
| E. Tujuan Penelitian .....                                                                                          | 17          |
| F. Manfaat Penelitian .....                                                                                         | 18          |
| G. Penelitian Terdahulu .....                                                                                       | 20          |
| H. Definisi Operasional.....                                                                                        | 26          |
| I. Metode Penelitian.....                                                                                           | 28          |
| J. Sistematika Pembahasan .....                                                                                     | 32          |
| <b>BAB II KONSEP <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> TERHADAP BADAN<br/>PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).....</b>              | <b>34</b>   |
| A. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....                                                                 | 34          |
| B. Teori Partisipasi Masyarakat.....                                                                                | 47          |
| C. <i>Fiqh Siyāсах Dustūriyah</i> .....                                                                             | 48          |
| D. <i>Ahl Al-Hall Wa Al 'Aqd</i> .....                                                                              | 52          |
| <b>BAB III FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM<br/>MENGELOLA ASPIRASI MASYARAKAT DESA BANYUURIP .....</b> | <b>57</b>   |
| A. Gambaran Umum Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten<br>Gresik .....                                  | 57          |

|                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B. Kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam<br>Mengelola Aspirasi Masyarakat Desa Banyuurip Menurut Perda Nomor 12<br>Tahun 2018 .....               | 59         |
| C. Data Partisipasi Masyarakat Terkait Fungsi Badan Permusyawaratan Desa<br>(BPD) Dalam Mengelola Aspirasi Masyarakat Desa.....                                         | 65         |
| <b>BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> TERHADAP FUNGSI<br/>BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGELOLA<br/>ASPIRASI MASYARAKAT DESA BANYUURIP .....</b> | <b>82</b>  |
| A. Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuurip,<br>Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik .....                                                   | 82         |
| B. Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuurip,<br>Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik Perspektif <i>Fiqh Siyāsah<br/>Dustūriyah</i> .....     | 87         |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                                               | <b>94</b>  |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                     | 94         |
| B. Saran.....                                                                                                                                                           | 95         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                              | <b>97</b>  |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                                    | <b>100</b> |

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## Daftar Pustaka

- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Dar Kutub al-Ilmiyyah. (1996)
- Achmad, Mansyur. Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Perspektif Regulatif dan Aplikatif, Balai Pustaka, Jakarta. (2018)
- Adi Putra, I Gede, and Deli Bunga Saravistha. Pengaturan Wewenang, Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Marga Dauh Puri. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2. <https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.3787>. (2022)
- Adi, Rianto. Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit. (2004)
- Anwar, Khaeril. Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal IUS Vol III*, no. 8. (2015)
- Asori. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Indocamp, Tangerang Selatan. (2021)
- Aunur Rohmah (Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuurip), Wawancara, Gresik, 30 Januari 2025
- Basyuni, Abd. Rahman *Fiqh Siyāsah Dusturiyah: Kajian Hukum Politik Islam..* PT. RajaGrafindo Persada. (2017)
- Elia, Desnovel. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Studi Kasus di Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunuka, (Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa „Apmd“ Yogyakarta. (2023)
- Effendy, Khasan. Otonomi Desa Histori dan Kontekstual, Cet. I Bandung: CV Indra Prahasta. (2009)
- Ermawati (Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD Desa Banyuurip), Wawancara, Gresik, 2 Desember 2024
- Firman, Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, *AL ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1. (2022)
- Indonesia, Presiden Republik. UU Nomor 3 Tahun 2024.
- Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama). (2014)
- Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya. Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis). Yogyakarta: CV. Absolute Media. (2016)

- Karang, Mariani Ngura, Yohanes G. Tuba Helan, and Cyrilius W.T Lamataro. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Waijarang Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014" 1, no. 1 (2023)
- Khallaf, Abdul Wahab, .Ilmu Siyasah Islamiyah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. (2005)
- Kusumaatmadja, Mochtar. Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Cet. ke-2 Bandung: Bina Cipta. (1986)
- Masruhan,. Metodologi Penelitian (Hukum). Surabaya: UINSA Press. (2014)
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. (2004)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Provinsi Jawa.Timur, "Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur," 2015.
- Pulungan, Suyuthi, M.A. *Fikih Siyasah. Syria Studies. Vol. 7.*, [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0,5&cluster=11540206902800085913%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/269107473\\_What\\_is\\_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil wars\\_12December2010.p](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=11540206902800085913%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil%20wars_12December2010.p). (2015)
- Rafiq, Aunur, dan Asrizal Muhamad, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Jang Kecamatan Moro Kabupaten Karimun." *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 2 [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(2\).5972](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(2).5972). (2020)
- Rahyunir Rauf, dan Sri Maulidiah (Ed).. Badan Permusyawaratan Desa. Pekanbaru: Zanafa Publishing. (2016)
- Ridho, Muhammad.. "Penerapan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Kemandirian Desa Di Era Digital" 2, no. 6 (2024)
- SF (warga Desa Banyuurip), Wawancara, Gresik, 1 Oktober 2024
- Shihab, M. Quraish *Fiqh Politik Islam*, Jakarta: Mizan. (2003)
- Soeharto, E., *Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2006)

- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Edisi revisi, cetakan pertama Malang: Setara Press. (2014)
- Sumpeno, Wahjudin *Perencanaan Desa Terpadu*, Banda Aceh : Read (2011)
- Supandi (Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)), Interview, Gresik, 28 September, 2024
- Sudarsono, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*, Yogyakarta: Graha Ilmu (2010)
- Syamsuddin, S., *Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Desa*, Jakarta: RajaGrafindo Persada (2014)
- Widjaja, H. A. W. *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*, Cet. 1 Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada. (2003)
- Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok : Prenadamedia Group. (2017)
- Ukasyah "Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinjauan Fiqh Siyasah" *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2021.
- Utuli, Fatma, Saleh Al Hamid, and Udin Hamim. Analisis Kinerja BPD Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Desa Ombulodata Kabupaten Gorontalo Utaran (2024)
- Uway, Valery Imanuel, Rudi Watulingas, and Toar K. R. Palilingan. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 4 <https://repository.untad.ac.id/213/>.(2024)